# **Pendahuluan**

## **Definisi dan Latar Belakang Demokrasi**

Sistem pemerintahan yang berlaku di suatu negara erat kaitannya dengan kata “demokrasi”. Menurut Lutz dan Toit (2014), demokrasi adalah nama sistem pemerintahan yang berada diantara liberal dan totalitarian. Selain itu, ditandai dengan adanya rakyat yang dapat bertindak secara bertanggung jawab dan dapat mengontrol pemerintahan sehingga jalannya pemerintahan dapat secara penuh mengakomodasi kepentingan rakyat (Dahl dan Tufte, 1973). Ditegaskan bahwa demokrasi tidak menjamin persamaan status ekonomi rakyat, keadilan sosial, dan perasaan senasib sepenanggungan, apapun hasil dari penyelenggaraan demokrasi, yang dilihat hanya prosedur pengelenggaraan pemerintahan yang sesuaid dengan prinsip demokrasi

Sebenarnya, konsep demokrasi terjadi sejak zaman Plato, pada waktu itu telah dianut sistem demokrasi langsung, yaitu beberapa orang dipilih untuk bertugas sebagai eksekutif, lalu sisanya, yaitu semua penduduk menjadi legislatif yang mengawasi dan memberikan saran atau masukan dalam menjalankan pemerintahan. Oleh sebab itu, Plato berpendapat bahwa idealnya suatu negara memiliki kurang dari sampai dengan 5.040 orang penduduk, sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang berasal dari aspirasi langsung legislatif. Selanjutnya, Aristoteles tidak menyebutkan secara jelas berapa jumlah ideal penduduk, namun untuk menciptakan demokrasi langsung dimana setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapa,

Aristoteles berpendapat bahwa komunikasi antara legislatif dan eksekutif akan berlangsung efektif jika jumlah yang hadir dapat berbicara dan dapat mendengar satu dengan yang lain, tanpa menggunakan pengeras suara tambahan. Artinya, baik Plato maupun Aristoteles berpikir untuk dapat menciptakan kondisi ideal dalam rangka melaksanakan demokrasi langsung di suatu negara. Namun, seiring berjalannya waktu, penduduk semakin banyak, sehingga demokrasi langsung digantikan oleh perwakilan, atau disebut demokrasi tidak langsung.

Sebelum tahun 1454, masyarakat Eropa tunduk dan patuh terhadap aturan yang dikeluarkan oleh *Christian Roman Catholic*. Pada saat itu, pemerintahan bersifat homogen dan mengacu pada aturan gereja katolik Roma. Kemudian muncul Marthin Luther yang memprotes doktrin-doktrin gereja Roma. Marthin Luther merupakan ahli teologi yang terkenal pada masa itu. Ditambah lagi, pada abad ke-15, Eropa menemukan beberapa inovasi yang penting: bubuk mesiu, sistem navigasi laut, dan mesin cetak. Mesin cetak ini yang turut membantu Marthin Luther untuk menyebarkan pendapatnya yang bertentangan dengan praktik aturan Katolik Roma. Hal ini dikenal dengan reformasi protestan. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai gelombang pertama sampai dengan ketiga demokrastisasi di dunia (Huntington, 1991).

### **Gelombang Pertama Demokratisasi**

Demokrasi mulai muncul di Amerika Serikat pada tahun 1828, ditandai dengan adanya pemilihan presiden. Setelah itu, disusul oleh negara-negara lain, seperti Switzerland, Perancis, Inggris. Selain itu, Spanyol dan Chili juga beralih sistem pemerintahan menjadi demokrasi. Setelah terjadi gelombang pertama demokratisasi, pada tahun 1920 sampai dengan 1930, sistem pemerintahan Kembali lagi ke sistem awal, yaitu otoriter. Ditandai dengan Yugoslavia dan Bulgaria yang memiliki pemimpin dictator. Kemudian, Hittler yang pada tahun 1933 mengakhiri maka demokrasi di Jerman. Disusul oleh Ceko 1938, Yunani pada tahun 1936, Portugal pada tahun 1926, Brazil dan Argentina tahun 1930, Uruguai tahun 1933, Spanyol tahun1939, terakhir Jepang tahun 1930 an.

### **Gelombang Kedua Demokratisasi**

Setelah perang dunia kedua, demokratisasi kembali terjadi. Diawali oleh Jerman Barat, Italia, Austria, Jepang, dan Korea. Kemudian antara tahun 1940 atau 1950 Turki dan Yunani pemerintahannya beralih ke sistem demokrasi. Uruguai beralih ke sistem demokrasi pada tahun 1940 an. Malaysia tahun 1957 beralih menjadi “quasy-demokrasi” atau dapat disebut semi demokrasi, yaitu menggabungkan unsur demokrasi dan otoriter. Sedangkan Indonesia, tahun 1950 sampai 1957 menjalanan sistem demokrasi parlemen, yaitu eksekutiff menjalankan roda pemerintahan demokrasi, namun kepala negara dengan kepala pemerintahan merupakan orang yang berbeda. Terakhir, Nigeria Kembali menganut demokrasi pada tahun 1960.

Demokratisasi pada gelombang kedua ini rupanya tidak berlangsung lama, karena tahun 1962 Peru kudeta militer. Selain itu, tahun 1964 Brazil dan Bolivia digulingkan oleh kekuatan militer, disusul oleh Argentina tahun 1966 dan Ekuador 1972. Chili dan Uruguai menjadi negara yang dikuasai oleh militer tahun 1973. Selain itu, tahun 1961 Korea pun dikuasai militer. Indonesia pun terjadi penurunan tingkat demokrasi, pada tahun 1957 Presiden Sukarno mengganti sistem pemerintahan menjadi sistem demokrasi terpimpin, yaitu masih terdapat pemilihan umum namun dalam pelaksanaan eksekutif memiliki pandangan dan tujuan yang bersifat otoriter, berakhir pada tahun 1965 ketika rezim Sukarno digantikan oleh sistem Orde Baru yang berpangku pada kekuatan militer dalam pelaksanaan pemerintahan, disusul oleh Filipina tahun 1972 dan India pada tahun 1975.

### **Gelombang Ketiga Demokratisasi**

Gelombang ketiga demokratisasi berawal dari runtuhnya pemerintahan dictator Portugal tahun 1974, disusul Tiongkok tahun 1989. Mulai tahun 1970 an, demokrasi mulai bergerak ke Amerika Latin. Dibuktikan dengan Ekuador yang melakukan pemilihan setelah kekuatan militer menyerahkan tahtanya. Begitu juga dengan Peru yang melakukan pemilihan tahun 1980, lalu pemilihan presiden di Bolivia tahun 1982, disusul oleh Argentina yang melakukan pemilihan pada tahun 1983. Mulai tahun 1977, demokrasi membanjiri sistem pemerintahan di Asia, diantaranya Turki, Filipina, Korea, Taiwan, dan Pakistan.

## **Pengukuran Demokrasi**

Mulai sejak tahun 1981, seiring dengan perkembangan demokrasi. Tidak lagi membicarakan untuk beralih dari sistem otoriter menuju demokrasi, namun lebih membicarakan kualitas demokrasi. Oleh sebab itu, dilakukan pengukuran demokrasi untuk mencapai tujuan tersebut. Inisiasi pengukuran demokrasi melalui *The World Values Survey* yang melakukan wawancara kepada 57 negara sebagai responden terkait dengan demokrasi. Hasilnya, 90,2% setuju dengan sistem demokrasi . Survey serupa pun dilakukan oleh *Voice of the People* yang diselenggarakan oleh *Gallup International Association* yang menyebar kuesioner terkait demokrasi kepada 50 negara. Hasilnya, 65% responden merasa puas dengan kualitas demokrasi, kemudian 79% merasa bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang tepat (Lutz dan Toit, 2014).

Pengukuran demokrasi yang bersifat global yang terkenal dan masih dilakukan sampai sekarang adalah: Boix-Miller-Rosato, *Democracy Dictatorship, Polity IV,* *Freedom House, Acemoglu-Naidu-Restrepo-Robinson,Vanhanen Index, Unified Democracy Score, Lexical Index of Electoral Democracy,* dan *V-Dem’s Polyarchy Index* (Gründler dan Krieger, 2021)*.* Selain survey yang mencakup global banyak negara, ada juga survey yang dilakukan internal suatu negara. Contohnya AfroBarometer yang dilakukan oleh pemerintah Afrika Selatan, LatinoBarometer yang dilakukan oleh 18 negara di Amerika Latin, ArabBarometer, *The European Values Study,* EuroBarometer, *New Rusia Barometer,* dan Korea Barometer (Lutz dan Toit, 2014).

### **Pentingnya Pengukuran Demokrasi di Indonesia**

Pengukuran demokrasi bertujuan untuk mengetahu tingkat demokrasi atau capaian demokrasi dari setiap provinsi (BPS, 2009). Selain itu, hal ini dilakukan sebagai dasar perencanaan pembangunan politik berdasarkan angka yang dihasilkan pada setiap indikator demokrasi. Apabila terdapat nilai rendah, maka perlu perencanaan pembangunan berkaitan dengan indikator tersebut.

Sebaliknya, apabila suatu indikator memiliki nilai tinggi, maka perlu dicermati bagaimana upaya untuk mempertahankan. Kemudian, pengukuran demokrasi menjadi sangat penting sebagai komparasi atau perbandingan tingkat demokrasi dengan negara lain. Kemudian, menjadi dasar data bagi penelitian yang berkaitan dengan politik dan keamanan bagi para akademisi, maupun peneliti. Terakhir, menurut Bashar (2019), ukuran demokrasi akan menjadi acuan besarnya pinjaman atau hibah dana dari *International Monetary Fund, World Health Organization, World Bank*, dan lain-lain.

### **Pengukuran Demokrasi di Indonesia**

Pengukuran demokrasi di Indonesia menggunakan indeks demokrasi yang diukur serta diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun rentang indeksnya dari 0 sampai 100. Arti dari 0 adalah sama sekali tidak ada demokrasi, sedangkan 100 adalah demokrasi sempurna atau demokrasi penuh. Adapun pengukuran demokrasi di Indonesia hanya mencakup demokrasi politik yang terdiri dari tiga aspek: kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.

Yang dimaksud dengan kebebasan sipil, yaitu setiap warga negara memiliki hak atau kebebasan dalam melakukan sesuatu, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Oleh sebab itu, indeks demokrasi akan mengukur seberapa jauh warga negara Indonesia dapat menggunakan kebebasannya. Kebebasan yang dimaksud adalah: (1) Kebebasan berkumpul dan berserikat, (2) Kebebasan berpendapat, (3) Kebebasan berkeyakinan, dan (4) Kebebasan dari diskriminasi.

Aspek di atas dapat diartikan bahwa apabila terjadi pelarangan terhadap kebebasan warga negara, maka terdapat penurunan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Misalnya, penurunan angka indeks demokrasi karena ada pembubaran suatu kelompok, atau adanya hambatan untuk menyampaikan pendapat terkait pemerintahan, adanya pembatasan atau mewajibkan melakukan ritual terkait agama dan keyakinan individu, atau juga pengasingan dan perlakuan yang berbeda antara sesame warga negara.

Aspek selanjutnya adalah hak-hak politik yang mengukur besarnya keleluasaan warga negara untuk partisipasi dalam pemerintahan melalui pemilihan umum, yaitu setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Misalnya, untuk kaum difabel yang memiliki keterbatasan khusus, tentunya mempunyai hak untuk disediakan fasilitas tertentu untuk berpartisipasi dalam pemilu. Kurangnya fasilitas tersebut dapat diartikan sebagai penurunan derajat demokrasi itu sendiri. Kemudian, apabila ada kecurangan penghitungan suara pemilu, maka dianggap sebagai mencederai demokrasi.

Aspek terakhir adalah lembaga demokrasi yang berfungsi sebagai representasi rakyat. Sebagaimana menurut Bashar (2019) bahwa demokrasi ditandai dengan keterwakilan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang berkedudukan di setiap provinsi dan Kabupaten memiliki fungsi utama yaitu pengawasan. Apabila DPRD secara aktif memberikan rekomendasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan atau saran-saran pembangunan, maka dapat dinilai bahwa demokrasi telah berjalan baik.

Partai politik juga termasuk ke dalam lembaga demokrasi yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan demokrasi melalui adanya kegiatan kaderisasi. Selain itu, proporsi kader perempuan dalam partai menjadi salah satu indikator adanya demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk berperan aktif dalam dunia politik melalui partai politik. Lembaga lain yang menjadi ciri demokrasi telah berjalan sebagaimana mestinya adalah lembaga peradilan. Tanda bahwa demokrasi tidak berjalan baik adalah adanya keputusan-keputusan yang kontroversial oleh hakim atau penghentian penyidikan yang bersifat kontroversial.

Ketiga aspek tersebut umumnya dapat diukur melalui pemberitaan surat kabar. Walaupun menurut Hölig and Hasebrink (2021) dalam bukunya yang berjudul *Reuter Institute Digital News Report* 2021 halaman 18 bahwa proporsi penduduk Indonesia yang mempercayai berita hanya 39 persen, namun menurut Tewksbury dan Rittenberg (2012) bahwa masyarakat menggunakan *social media*, kemudian akan membuka portal berita untuk menemukan kronologi kejadian ataupun pemberitaan yang lebih lengkapnya.

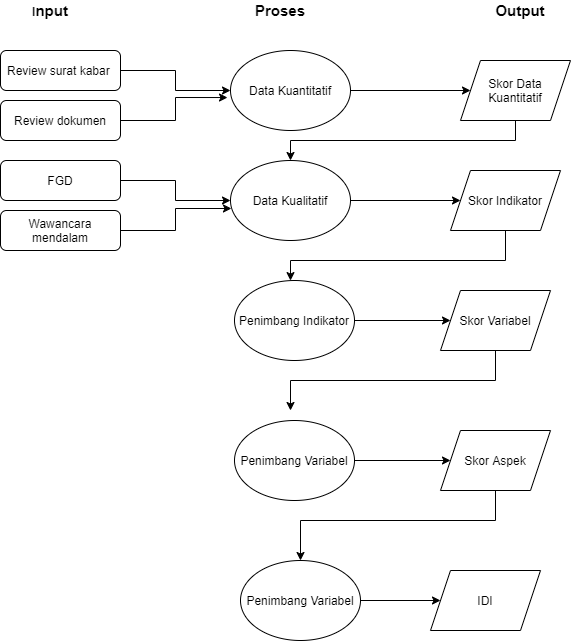
Di samping itu, Henke (2020) mengatakan bahwa kredibilitas surat kabar menjadi perhatian penting. Kredibilitas disini adalah kekuatan surat kabar tersebut menampilkan fakta yang sesuai dengan kejaadian sebenarnya sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu, jurnalis yang merupakan penulis berita tidak hanya dituntut untuk menceritakan kejadian, namun melakukan riset dengan menambahkan sumber-sumber ilmiah, data-data statistik, dan visualiasasi data untuk meningkatkan kredibilitas berita yang dilaporkan. Terakhir, dibandingkan dengan media sosial yang merupakan buah pikiran perorangan, surat kabar memiliki struktur organisasi sehingga setiap jurnalis akan menyetor berita yang telah ditulis kepada editor untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian terdapat pemimpin redaksi yang bertanggung jawab terhadap berita yang diterbitkan, sehingga berita yang disampaikan pada masyarakat terjaga kualitasnya.

Setelah berita yang memuat indikator-indikator demokrasi dikumpulkan, maka dikelompokkan menurut indikator. Indikator yang dimaksud adalah jenis berita yang dapat membuat nilai demokrasi naik atau turun yang disebabkan oleh suatu peristiwa terjadi. Contohnya adalah “Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya” , maka jika pada tahun tersebut keluar aturan tertulis yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah seseorang, maka dianggap telah menurunkan nilai demokrasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Coppedge dkk. (2011) bahwa demokrasi politik akan terjadi apabila di dalamnya terdapat sedikit regulasi. Artinya, semakin banyak regulasi, semakin rendah nilai demokrasi karena kebebasan individu akan terhalangi oleh aturan yang dibuat.

Langkah selanjutnya untuk menghitung indeks demokrasi adalah mempresentasikannya dalam bentuk *focus group discussion*. Dalam buku Potret Demokrasi Provinsi Jawa Barat disebutkan bahwa *focus group discussion* memiliki tiga kunci dalam menjabarkan artinya, yaitu (1) Fokus secara spesifik, tidak bersifat umum, (2) Grup artinya kelompok, bukan individu, (3) Diskusi yaitu dalam forum terbuka mengemukakan pendapat atau menyertakan data baru, bukan bersifat wawancara perorangan (BPS, 2021:13).

Yang dihadirkan dalam *focus group discussion* adalah semua pihak yang terlibat dalam demokrasi. Artinya, dari segala jenis kalangan yang mewakili kelompoknya berdasarkan jenis pekerjaan, karena demokrasi adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian, ada kekurangannya, yaitu tidak diketahui secara pasti minimal jumlah orang yang hadir, dan minimal kapasitas pengetahuan yang dimiliki dari setiap individu yang hadir, karena ada kemungkinan bahwa terdapat individu yang tidak memberikan kontribusi dalam *focus group discussion* ini.

Selain *focus group discussion*, ada tahap selaanjutnya yang dilakukan, yaitu wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini dilakukan guna memverifikasi berita dan menggali lebih dalam lagi mengenai isu tertentu. Wawancara mendalam dilakukan pada orang yang dianggap ahli atau berperan dalam suatu isu tertentu. Apabila digambarkan, maka berikut adalah alur penghitungan indeks demokrasi dimulai dari pengumpulan data yang berasal dari surat kabar hingga penghitungan nilai indeks demokrasi menggunakan pembobotan tertentu yang telah ditetapkan oleh tim ahli di bidang demokrasi (BPS, 2021).



|  |  |
| --- | --- |
| Gambar I. 1 | Diagram alur perhitungan Indeks Demokrasi |

## **Latar Belakang**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengukuran demokrasi. Seperti yang dijelaskan oleh BPS (2021) bahwa pengukuran demokrasi berada pada tingkat provinsi, sehingga pentingnya pengukuran demokrasi bertujuan untuk mengetahui taraf demokrasi di setiap provinsi, sehingga dapat dibandingkan antar wilayah dan antar tahun karena pengukuran demokrasi yang berasal dari indeks demokrasi dihitung setahun sekali. Nilai demokrasi ini, dapat menjadi umpan atau sumber landasan untuk membuat rencana kebijakan terkait politik di provinsi tersebut. Misalnya, dengan adanya penurunan nilai demokrasi, maka untuk tahun selanjutnya direncanakan program pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran demokrasi di provinsi tersebut.

Selain indeks demokrasi di setiap provinsi, dihitung pula rata-rata indeks demokrasi seluruh provinsi dengan penimbang tertentu untuk menghitung indeks demokrasi Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengetahui nilai demokrasi Indonesia di antara negara-negara lain. Pada publikasi yang ditulis oleh Bashar (2019), disebutkan bahwa nilai demokrasi mempengaruhi besaran bantuan atau pinjaman yang dikeluarkan oleh *World Bank*, *International Monetary Fund*, *World Health Organization*, dan lain-lain. Selain itu, demokrasi yang baik akan menciptakan kondisi ekonomi yang baik (Martin dkk., 2018; Treisman, 2020). Kondisi demokrasi yang baik berarti bebas dari kekerasan dan ancaman sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan seperti biasa, tidak terkendala oleh situasi atau kejadian yang menghambat kegiatan ekonomi.

Hal lain yang membuat pengukuran demokrasi itu penting adalah sebagai sumber data penelitian para akademisi Indonesia maupun luar negeri yang tertarik atau berkecimpung di bidang politik dan keamanan, khususnya mengenai demokrasi. Achmad dkk. (2020) membuat tulisan mengenai indeks demokrasi di Kota Blitar tahun 2018, dimana nilai demokrasi tahun tersebut diulas berdasarkan publikasi-publikasi sebelumnya, kemudian dikaitkan dengan nilai demokrasi pada tahun tersebut.

Kemudian, Adib dkk. (2019) menggunakan angka indeks demokrasi, indeks gini, dan upah minimum provinsi dari tahun 2010 sampai dengan 2016 untuk meneliti apakah terdapat hubungan atau pengaruh terhadap perkembangan ekonomi menggunakan metode *Random* *Effect* *Model*. Hasilnya, indeks demokrasi Bersama dengan indeks gini dan upah minimum provinsi bersamaan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan apabila satu per satu variabel diukur pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, hanya indeks gini dan upah minimum provinsi yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Agussalim dan Nurhandayani (2021) menggunakan data Indeks Demokrasi Provinsi Gorontalo tahun 2019 sebagai landasan untuk meneliti kualitas Komisi Pemilihan Umum di Kota Gorontalo. Hasilnya, Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo memiliki peran dalam rangka peningkatan nilai demokrasi di Provinsi Gorontalo. Selain Agussalim dan Nurhandayani, Anggraini (2019) juga menggunakan data indeks demokrasi tahun 2013 sampai dengan 2017 untuk mengukur apakah Indeks Demokrasi Indonesia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ternyata hasilnya sangat berpengaruh positif.

Selain meneliti hubungan atau pengaruh demokrasi Indonesia dengan variabel lain, peneliti lain juga meneliti dari segi yang berbeda, yaitu (Fajri dkk., 2021) yang menganalisis indeks demokrasi dari tahun 2009 sampai dengan 2019. Penyebab rendahnya Indeks Demokrasi Provinsi Sumatera Barat adalah banyaknya aturan tertulis yang mengatur ibadah yang berhubungan dengan kepercayaan atau agama yang dianut masyrakat. Selain itu, rendahnya peran legislative dalam hal ini DPRD terhadap pemerintahan di Sumatera Barat, sehingga pihak eksekutiv mengambil peran terlalu dominan.

Fitri (2018) dari fakultas mipa Universitas Syiah Kuala menguji diskriminan linier klasik dibandingkan dengan diskriminan linier *robust* dalam mengklasifikasikan demokrasi di Indonesia. Sebagai informasi, pengelompokan nilai demokrasi di Indonesia berdasarkan nilai indeks demokrasi terbagi atas tiga kelompok: (1) buruk dengan nilai indeks demokrasi di bawah 60, (2) sedang jika indeks demokrasi berada pada nilai 60 sampai dengan 80, (3) baik jika tingkat indeks demokrasi lebih dari 80 (BPS, 2021).

Ibrahim (2017) mengumpulkan data indeks demokrasi dari tahun 2009 sampai dengan 2014, kemudian mengevaluasi indikator dan metodologi pengukuran demokrasi, salah satu diantaranya adalah keterbatasan pengumpulan data yang menggunakan hanya satu jenis surat kabar. Hal ini berkaitan dengan jangkauan dari surat kabar tersebut. Ada beberapa peristiwa yang tidak tertulis dalam surat kabar tersebut, dan khususnya di Provinsi Bangka Belitung surat kabar tersebut belum menyentuh seluruh elemen masyarakat Provinsi Bangka Belitung.

Selain Ibrahim yang menganalisis mengenai pengukuran demokrasi melalui indeks demokrasi, Jati (2021) juga menganalisis penyebab kemunduran demokrasi Indonesia. Jati menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2019, laporan *The Economist Intelligent Unit* tahun 2020, serta *Democracy Report* tahun 2021 untuk bahan analisisnya. Kesimpulannya, terdapat tiga faktor yang menyebabkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Pertama, peran militer meningkat mengatur interaksi sosial dalam dunia maya dan dunia nyata sehingga menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia. Kedua, permasalahan oposisi yang cenderung dieliminasi dari kehidupan politik di Indonesia, seharusnya oposisi itu menjadi penyeimbang bagi roda pemerintahan. Terakhir, kecenderungan untuk memilih figure-figur yang bersifat individualistik, bukan berdasarkan partai politik, sehingga didapat 16 pasangan calon kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa elit di Indonesia.

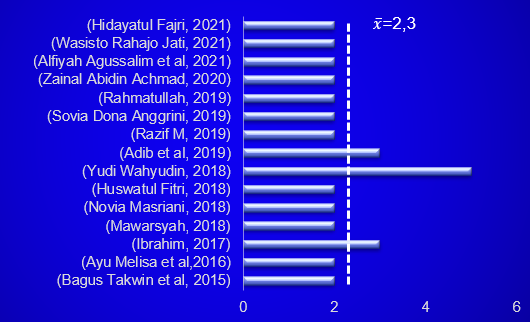
Akademisi selanjutnya yang mempelajari pengaruh demokrasi terhadap variabel lain adalan Masriani (2018) yang menguji hubungan antara demokrasi dengan permintaan asuransi jiwa di Indonesia. Hasilnya, demokrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah premi asuransi di Indonesia. Masih pada tahun 2018, Mawarsyah (2018) meneliti antara perkembangan demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu, hasilnya tidak ada korelasi antara keduanya. Secara khusus, Mellisa dkk. (2016) meneliti tentang kebebasan beragama yang merupakan salah satu indikator demokrasi. Hasil penelitian, pemerintah masih mengeluarkan aturan terkait ibadah dan agama, sehingga menyebabkan indeks demokrasi rendah. Selanjutnya, Mellisa dkk. (2016) menyoroti jumlah surat kabar yang dijadikan acuan pengukuran demokrasi, seharusnya lebih dari satu agar sebagai pembanding dan pelengkap berita-berita yang mungkin tidak tertulis pada surat kabar yang terpilih.

Dari Jakarta, Rahmatulloh (2019) mempublikasikan tulisannya yang mengungkap gambaran demokrasi DKI Jakarta dilihat dari angka Indeks Demokrasi Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Kesimpulannya, DKI Jakarta dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 menempati provinsi tertinggi tingkat demokrasi di Indonesia dan menjadi acuan dari seluruh provinsi. Kemudian dari Univeritas Sumatera Utara, Razif (2019) meneliti pengaruh tata kelola keuangan daerah dan demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Tata Kelola keuangan yang menjadi variabel bebas terdiri dari: Laju PDRB, Indeks Opini Badan Pemeriksa Keuangan, Indeks Investasi, Indeks Belanja Daerah, dan Indeks Tenaga Kerja di Indonesia. Hasilnya, hanya variabel Indeks Investasi yang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Takwin dkk. (2014) membuat laporan mengenai pengukuran indeks demokrasi Indonesia dengan mencocokan kuesioner yang dibuat untuk mewawancarai warga. Menurut warga, demokrasi tertinggi ditentukan oleh pemilihan umum dan kebebasan beragama.

## **Masalah Penelitian**

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pengukuran demokrasi sangat penting karena berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan, utamanya berhubungan dengan faktor ekonomi. Namun sampai saat ini, data yang digunakan untuk melakukan penelitian mereka belum bersifat kekinian. Rata-rata jeda antara tahun publikasi dan tahun terakhir data adalah 2,3 tahun. Oleh sebab itu, diperlukan pengukuran demokrasi di Indonesia yang dapat menghasilkan data secara akurat dan terkini. Selain itu, biasanya Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementrian PPN/Bappenas) meminta Badan Pusat Statistik untuk melakukan prediksi nilai indeks demokrasi guna perencanaan pembangunan berbasis politik di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini sanget penting untuk dilakukan untuk menjawab kedua tantangan tersebut.



|  |  |
| --- | --- |
| Gambar I. 2 | Jeda antara Tahun Publikasi dan Tahun Terakhir Data Indeks Demokrasi |

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dilakukan *literature review* atau peninjauan terhadap publikasi-publikasi sebelumnya apakah sudah ada yang meneliti mengenai metode pengukuran demokrasi sehingga menghasilkan angka secara lebih cepat daripada menggunakan penghitungan demokrasi melalui metode indeks demokrasi. Selain itu, diteliti juga mengenai publikasi-publikasi yang menulis tentang cara memprediksi nilai demokrasi di Indonesia. Dari hasil peninjauan publikasi, terdapat beberapa peneliti yang mengukur demokrasi dengan menggunakan metode pendekatan pengklasifikasian teks untuk mengetahui perbandingan antara pemberitaan baik atau buruk tentang nilai demokrasi (Lutz dan Toit, 2014; Marzagão, 2017; Oliveira dkk., 2019; Papp dkk., 2020; Srivastava dkk., 2018). Namun, dari semua publikasi yang terkumpul, tidak ada yang berasal dari Indonesia dan meneliti pengukuran demokrasi di Indonesia.

Kemudian, penelitian mengenai metode terbaik untuk memprediksi demokrasi Indonesia dilakukan oleh Huda dan Rahutomo dkk. (2019; 2020), kemudian dilengkapi oleh publikasi dari luar negeri yang dilakukan oleh Bashar (2019) serta Gründler dan Krieger (2021). Singkatnya pada kesempatan ini akan diteliti apakah *sentiment analysis* dapat digunakan untuk mengukur dan memprediksi tingkat demokrasi di Indonesia.

## **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah *sentiment analysis* dapat digunakan untuk mengukur demokrasi di Indonesia serta untuk mengetahui nilai prediksi tingkat demokrasi di Indonesia menggunakan *sentiment* *analysis.*

## **Batasan Masalah**

Pada penelitian ini, data yang digunakan dibatasi hanya untuk wilayah Jawa Barat dan untuk pengukuran demokrasi di wilayah Jawa Barat saja. Namun, sebenarnya angka demokrasi provinsi lain maupun nasional memiliki metode yang sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengukuran provinsi lain maupun angka nasional diwakili oleh pengukuran demokrasi di Jawa Barat

## **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini berfungsi untuk menambah pengetahuan mengenai pengukuran dan prediksi nilai demokrasi di Indonesia. Selain itu, sebagai pembuktian metode selain indeks demokrasi dapat digunakan guna mempercepat terbitnya data tingkat demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan.

## **Sistematika Penulisan**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bab I** | **Pendahuluan** |
|  | Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan |
| **Bab II** | **Studi Literatur** |
|  | Bab ini mengumpulkan referensi untuk memecahkan masalah guna sebagai alat identifikasi metodologi penelitian yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. |
| **Bab III** | **Metodologi Penelitian** |
|  | Bab ini akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan dasar penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya |
| **Bab IV** | **Analisis dan Perancangan** |
|  | Bab ini menampilkan rancangan pengukuran tingkat demokrasi di Indonesia. Kemudian, menguji model yang dapat mengklasifikasikan berita surat kabar menjadi positit atau negatif nilai demokrasinya. |
| **Bab V** | **Implementasi dan Pengujian** |
|  | Bab ini menampilkan hasil pengujian model yang digunakan untuk mengukur nilai demokrasi berdasarkan tahapan sebelumnya. |
| **Bab VI** | **Kesimpulan dan Saran** |
|  | Bab ini akan menegaskan apakah hipotesis di awal, yaitu pada Bab I, dapat terjawab berdasarkan implementasi model serta pengujian terhadap data indeks demokrasi yang selama ini sudah diakui keakuratannya. |